



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 77 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI DINAS PEGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sebagai dasar dalam menyusun analisis jenis jabatan, kebutuhan jumlah, distribusi pegawai guna mendukung tujuan instansi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 90 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 77 Tahun 2018 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
6. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
7. Identitas Jabatan yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan dan ikhtisar jabatan.
8. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam suatu wadah jabatan, tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama.
9. Kode Jabatan adalah kode yang mempresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
15. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
16. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
17. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan.
18. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
19. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja.
20. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi seginya,
21. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan.
22. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
23. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
24. Volume Kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.
25. Efektivitas dan Efisiensi Kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
27. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
28. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
29. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka pemetaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perencanaan kebutuhan pendidikan

dan pelatihan, untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan /unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi.

- (2) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapat informasi jabatan yang dilaksanakan melalui tahapan :
- a. persiapan;
 - b. penyampaian data;
 - c. pengolahan data;
 - d. verifikasi;
 - e. penyempurnaan; dan
 - f. penetapan hasil jabatan dan penetapan hasil analisis beban kerja.

Pasal 3

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan mengumpulkan data jabatan dengan cara:

- a. formulir isian, berupa pengumpulan data dan investarisasi jumlah pemangku jabatan;
- b. wawancara;
- c. pengamatan langsung; dan/atau
- d. referensi.

Pasal 4

Tujuan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah untuk penyusunan kebijakan program :

- a. pembinaan dan penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
- b. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- d. evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- e. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- f. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- g. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- h. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
- i. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- j. program mutasi pegawai dari unit yang kekurangan;
- k. program promosi pegawai;
- l. pemberian penghargaan dan hukuman/sanksi (*reward and punishment*) terhadap unit atau pejabat; dan
- m. bahan penetapan kebijakan bagi pemimpin dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

BAB II HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja menghasilkan informasi yaitu :

- a. Uraian Jabatan;
 - b. Peta jabatan;
 - c. efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektifitas dan efisiensi unit kerja;
 - d. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
 - e. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
 - f. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit; dan
 - g. standar norma waktu kerja.
- (2) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), meliputi :
- a. identitas jabatan;
 - b. ikhtisar jabatan;
 - c. kualifikasi jabatan;
 - d. tugas pokok;
 - e. bahan kerja;
 - f. perangkat kerja;
 - g. hasil kerja;
 - h. tanggung jawab;
 - i. wewenang;
 - j. korelasi jabatan;
 - k. kondisi lingkungan kerja;
 - l. resiko bahaya;
 - m. syarat jabatan;
 - n. prestasi kerja; dan
 - o. kelas jabatan.

Pasal 6

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berupa:

- a. Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Dinas dalam Lampiran I;
 - b. Rekapitulasi Analisis Beban Kerja tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Peta Jabatan di Dinas tercantum dalam Lampiran III;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 90 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 90); dan
- b. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 77 Tahun 2018 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 77),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

AA

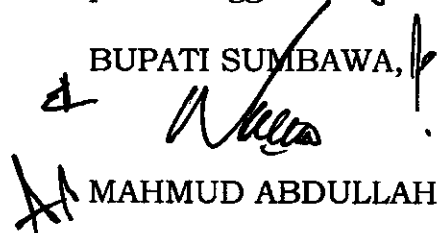
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 77

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA**

I. HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA KEPALA DINAS

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. JPT Utama :
 - b. JPT Madya :
 - c. JPT Pratama : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 - d. Administrator :
 - e. Pengawas :
 - f. Pelaksana :
 - g. Jabatan Fungsional :
4. Ikhtisar Jabatan:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
5. Kualifikasi Jabatan :
 - a. Pendidikan : S2/S1 Sospol/MSDM/bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
 - b. Kursus/Diklat
 - 1) Penjenjangan : Diklatpim Tingkat II
 - 2) Teknis :
 - a. Diklat Administrasi dan Manajemen.
 - b. Diklat Manajemen Strategik.
 - c. Diklat Pengelolaan barang.
 - d. Diklat Perencanaan dan Pengawasan.
 - e. Diklat Kehumasan.
 - f. Diklat Teknis Bidang pengendalian penduduk, advokasi, dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak.
 - g. Diklat Pengelolaan Proyek.
 - c. Pengalaman kerja :
 1. Pernah menjadi pejabat tinggi pratama Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 2 tahun.
 2. Pernah menjadi pejabat administrator Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekurang-kurangnya 4 tahun.

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya semua tugas dan tanggung jawab pengolahan data dengan baik atau sangat baik di bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
17. Kelas Jabatan : 6

BUPATI SUMBAWA, 
 MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR **77** TAHUN 2022
 TENTANG
 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
 BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		PNS	NON PNS		
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan	1		1	0
2	Sekretaris	1		1	0
	Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pelaporan				
	- JF Perencana Utama			1	-1
	- JF Perencana Madya			1	-1
	- JF Perencana Muda	1		1	0
	- JF Perencana Pertama			1	-1
	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Program dan Kegiatan			1	-1
	- Pengolah Data			1	-1
	Sub Koordinator Bidang Keuangan				
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Madya			1	-1
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1		1	0
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama			1	-1
	- Bendahara	1		1	0
	- Pengadministrasi Keuangan			1	-1
	- Pengolah Data			1	-1
	- Penata Laporan Keuangan	1		1	0
	- Verifikator Keuangan		1	1	0
	a Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1		1	0
	- JF Arsiparis Penyelia			1	-1
	- JF Arsiparis Mahir			1	-1
	- JF Arsiparis Terampil			1	-1
	- JF Pranata Komputer Penyelia			1	-1
	- JF Pranata Komputer Mahir			1	-1
	- JF Pranata Komputer Terampil			1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Penyelia			1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Mahir			1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Terampil			1	-1
	- Analis Tata Usaha			1	-1
	- Notulis Rapat			1	-1
	- Pengadministrasi Sarana dan Pra Sarana	1		1	0

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		PNS	NON PNS		
	- Pengadministrasi Umum	1	1	2	0
	- Petugas Keamanan		1	1	0
	- Pramur Kebersihan			1	-1
	- Pengemudi		1	6	-5
	- Pengelola Pemanfaatan BMD	1		2	-1
	- Pengadministrasi Kepegawaian	1		1	0
	- Pengadministrasi Persuratan		1	1	0
3	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga	1		1	0
	Sub Koordinator Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga				
	- JF Penyuluh Keluarga Berencana Utama			1	-1
	- JF Penyuluh Keluarga Berencana Madya			1	-1
	- JF Penyuluh Keluarga Berencana Muda	1		1	0
	- JF Penyuluh Keluarga Berencana Pertama			1	-1
	- Analis Ketahanan Keluarga			1	-1
	- Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga			1	-1
	- Pengadministrasi Umum		1	1	0
	Sub Koordinator Bidang Jaminan Berkeluarga Berencana				
	- JF Penyuluh Keluarga Berencana Utama			1	-1
	- JF Penyuluh Keluarga Berencana Madya			1	-1
	- JF Penyuluh Keluarga Berencana Muda	1		1	0
	- JF Penyuluh Keluarga Berencana Pertama			1	-1
	- Analis Alat dan Obat Kontrasepsi			1	-1
	- Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi		1	1	0
	- Pengolah Data	1		1	0
	Sub Koordinator Bidang Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana				
	- JF Penyuluh Keluarga Berencana Madya			1	-1
	- JF Penyuluh Keluarga Berencana Muda	1		1	0
	- JF Penyuluh Keluarga Berencana Pertama			1	-1
	- Analis Pembinaan Keluarga Berencana			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
	- Pengadministrasi Umum		1	1	0
4	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga	1		1	0
	Sub Koordinator Bidang Kesetaraan Gender				
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Utama			1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Madya			1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	1		1	0
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Pertama			1	-1
	- Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender			1	-1
	- Pengadministrasi Umum		1	1	0
	- Analis Keluarga Berencana			1	-1

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		PNS	NON PNS		
	Sub Koordinator Bidang Peningkatan Keluarga Berencana				
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Utama			1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Madya			1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	1		1	0
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Pertama			1	-1
	- Analis Keluarga Berencana			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	Sub Koordinator Bidang Data, Informasi Gender dan Anak				
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Utama			1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Madya			1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	1		1	0
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Pertama			1	-1
	- Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
5	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Penggerakan	1		1	0
	Sub Koordinator Bidang Pengendalian Kependudukan				
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Utama			1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Madya			1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	1		1	0
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Pertama			1	-1
	- Pemeriksa Kependudukan			1	-1
	- Analis Ketahanan Keluarga	1		1	0
	- Pengadministrasi Kependudukan			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
	Sub Koordinator Bidang Kependudukan				
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Utama			1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Madya			1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	1		1	0
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Pertama			1	-1
	- Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
	- Pengadministrasi Umum		1	1	0
	Sub Koordinator Bidang Advokasi dan Pergerakan				

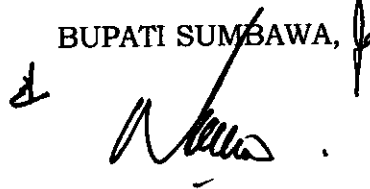
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		PNS	NON PNS		
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Utama			1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Madya			1	-1
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	1		1	0
	- JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Pertama			1	-1
	- Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
6	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	1		1	0
	Sub Koordinator Bidang Perlindungan Anak				
	- JF Analis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	1		1	0
	- JF Analis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	1		1	0
	Sub Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Anak				
	- JF Analis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	1		1	0
	- JF Analis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak			1	-1
	- Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	1		1	0
	Sub Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan				
	- JF Analis Kebijakan Utama			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya			1	-1
	- JF Analis Kebijakan Muda	1		1	0
	- JF Analis Kebijakan Pertama			1	-1
	- Analis Perlindungan Perempuan			1	-1
	- Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
7	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Lunyuk			1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
8	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Alas			1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		PNS	NON PNS		
9	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Utan	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1		1	0
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
10	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Batu Lanteh	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
11	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Sumbawa	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1		1	0
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
12	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Moyo Hilir	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
13	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Moyo Hulu	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1		1	0
	- Pengadministrasi Umum	1		1	0
	- Pengelola Data			1	-1
14	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Ropang	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
15	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Lape			1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
16	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Plampang			1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
17	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Empang			1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum	1		1	0
	- Pengelola Data			1	-1
18	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Alas Barat	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum	1		1	0
	- Pengelola Data			1	-1
19	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Labuhan Badas			1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1		1	0
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
		PNS	NON PNS		
20	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Labangka			1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
21	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Buer	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
22	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Rhee	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1		1	0
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
23	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Unter Iwes			1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1		1	0
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
24	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Moyo Utara			1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
25	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Maronge			1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
26	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Tarano	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
27	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Orong Telu	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
28	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Lopok			1	-1
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
29	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Lantung	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT			1	-1
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1
30	Kepala UPT KBPP-PA Kecamatan Lenangguar	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1		1	0
	- Pengadministrasi Umum			1	-1
	- Pengelola Data			1	-1

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
		PNS	NON PNS		
31	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	1		1	0
	a Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	1		1	0
	- Pengadministrasi Umum		1	1	0
	- Pengelola Data			1	-1
TOTAL		56	11	234	-167

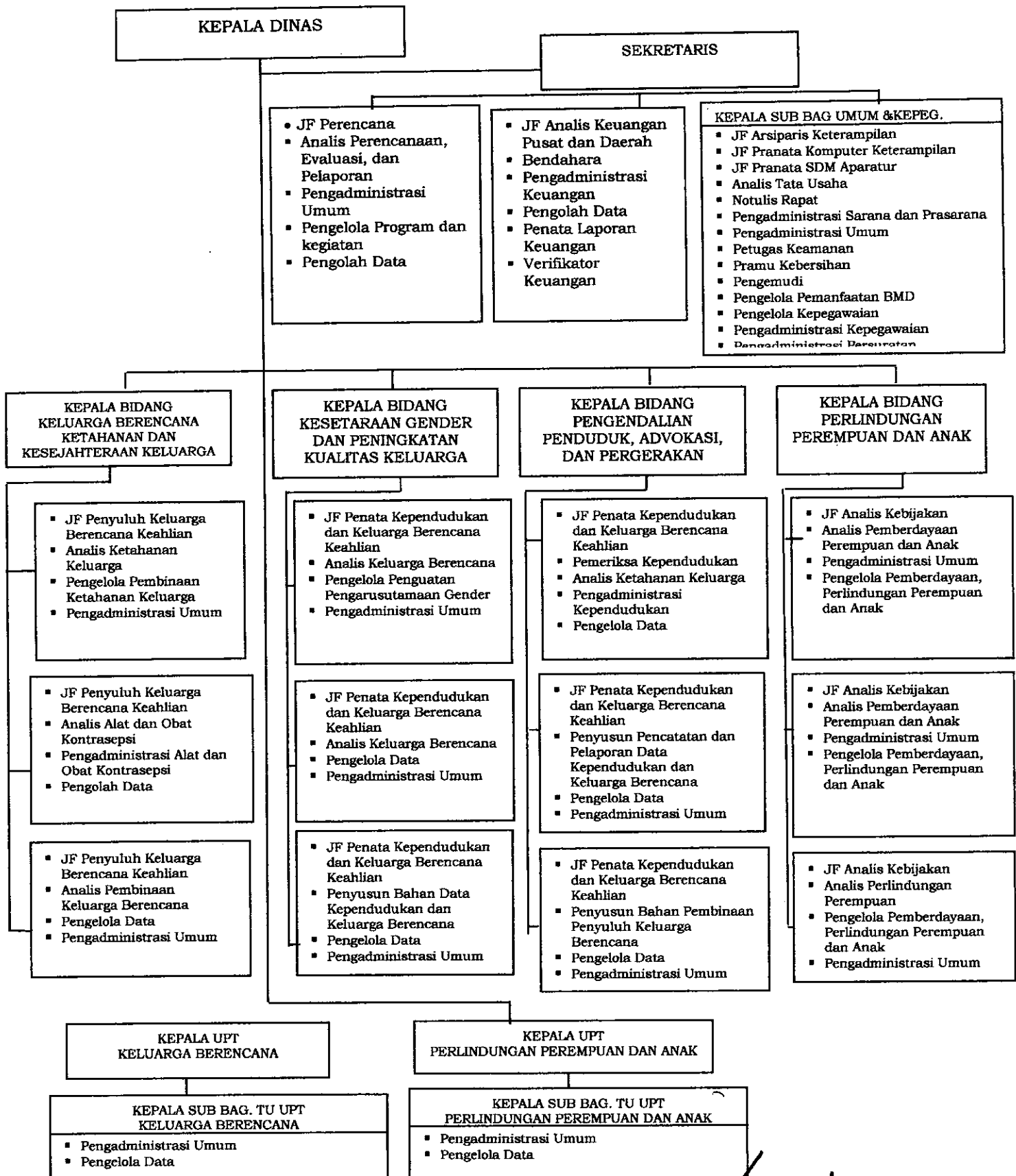
BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA

PETA JABATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH